



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-06KP.03.04 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-KP.10.02-051 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Rekomendasi Kenaikan Jenjang dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian;
  - bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, a.n. OLDARINA ASRI HERAWATY, S.S., M.M., dkk., telah memenuhi syarat dan direkomendasikan dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan setingkat lebih tinggi dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 52);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1418);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
  - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
  - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
  - Peraturan . . .

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 765);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dinaikkan dalam jenjang jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pemindahan pegawai tersebut tidak menjadi tanggungan negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 JANUARI 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
  
YASONNA H. LAOLY

Tembusan :

1. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
9. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-06.KP.03.04 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 JANUARI 2023

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	OLDARINA ASRI HERAWATY, S.S., M.M. NIP 198406152008012001	Penata Tk I (III/d)	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Analisis Keimigrasian Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Imigrasi	449,219
2.	R. DEDY CHAIRIL ZAIN, S.H., M.H. NIP 198304102002121003	Penata Tk I (III/d)	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	Analisis Keimigrasian Ahli Madya pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	404,269
3.	JUMIYO, S.Kom., M.M. NIP 198110162002121001	Penata Tk I (III/d)	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Analisis Keimigrasian Ahli Madya pada Kantor Wilayah Jawa Tengah	553,671
4.	DIAN PRATIWI A, S.Kom. NIP 198808082009122004	Penata Tk I (III/d)	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Wilayah Papua Barat	Analisis Keimigrasian Ahli Madya pada Kantor Wilayah Papua Barat	443,851
5.	ASTY FEBRIANI, S.E, M.H. NIP 198202232001122001	Penata Tk I (III/d)	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Wilayah DKI Jakarta	Analisis Keimigrasian Ahli Madya pada Kantor Wilayah DKI Jakarta	404,015
6.	MUHAMMAD RUSDI, S.H. NIP 196606091992031001	Penata Tk I (III/d)	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	Analisis Keimigrasian Ahli Madya pada Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	405,676
7.	PRIMADHITA ARIEZA PUSPARINI, A.Md.Im., S.H., M.H. NIP 198112092000122001	Penata Tk I (III/d)	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	Analisis Keimigrasian Ahli Madya pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	530,428
8.	Dr. LUCKY KARIM, S.E., S.H., M.Si. NIP 197002092005011001	Penata Tk I (III/d)	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	Analisis Keimigrasian Ahli Madya pada Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	436,355
9.	RINI HARTATI PUDJI HANDAYANI, S.H. NIP 197411081994032001	Penata Tk I (III/d)	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	Analisis Keimigrasian Ahli Madya pada Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta	405,281
10.	HAIRIL FAHMI, S.H., M.M. NIP 196801061990031001	Pembina (IV/a)	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kalimantan Selatan	Analisis Keimigrasian Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kalimantan Selatan	406,797

1	2	3	4	5	6
11.	MOCH FAUJAN, S.H. NIP 196806031994031001	Penata Tk I (III/d)	Analisis Keimigrasian Ahli Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	Analisis Keimigrasian Ahli Madya pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	422,321
12.	NITA DEWIASTI RISTANTI, A.Md.Im., S.H., M.Si. NIP 198706282006042001	Penata Tk I (III/d)	Analisis Keimigrasian Muda pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta	Analisis Keimigrasian Ahli Madya pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta	400,504

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
  
YASONNA H. LAOLY